

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah, sebagai eksekutor utama di negara, memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran proses pembangunan, termasuk pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan aspek pembangunan lainnya. Pemerintah diharapkan mampu berperan sebagai penyelenggara negara yang memajukan dan mendorong kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pendorong dalam mencapai perkembangan dan kemajuan. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat kemajuan dan perkembangan masyarakat, kita dapat mengamati sejauh mana pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, khususnya dalam Bab III yang membahas pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, menegaskan bahwa untuk memperkuat lembaga masyarakat, pemerintah perlu menerapkan dan melaksanakan kegiatan seperti apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya secara berkelanjutan membina lembaga-lembaga petani dengan fokus pada pola pengembangan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengarah pada pemikiran petani dalam menerapkan sistem pertanian baik dalam skala mikro maupun makro. Dengan adanya bimbingan dari pemerintah, diharapkan dapat memperpanjang peran aktif petani sehingga dapat memperoleh hasil maksimal. dari program pemerintah dalam mengembangkan

dan memajukan masyarakat melalui pemberdayaan mereka.

Dalam membantu memberdayakan kelompok tani pemerintah oleh dinas terkait yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura . Dinas tanaman pangan dan hortikultura sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi, seperti merencanakan,melaksanakan program pengembangan serta pembinaan tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengelola sumber daya tanah, memberikan penyuluhan kepada petani mengenai budidaya tanaman yang efisien,penggunaan pupuk,pengendalian hama, penyakit tanaman, mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti benih,pupuk alat pertanian dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Menurut Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 82 Tahun 2013, kelompok tani merujuk kepada sebuah himpunan petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan jenis komoditas, serta hubungan yang erat untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dengan meningkatnya peran pemberdayaan bagi masyarakat petani, diharapkan bahwa mereka akan mampu meningkatkan standar hidup serta memperbaiki kualitas keluarga, sambil menjadi penyumbang utama dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Karena sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada pertanian untuk hidup mereka, sangat penting untuk mendukung pertumbuhannya. Pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi perkembangan sektor lainnya, termasuk dalam aspek ekonomi, karena pentingnya pembangunan

ini, yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Akibatnya, perkembangan yang signifikan di sektor pertanian dapat memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama para petani, untuk diwujudkan¹.

Saat ini, kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian masih kurang optimal dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang pertanian, minimnya minat dalam meningkatkan kesejahteraan, dan adanya faktor sosial budaya yang memengaruhi aspek pertanian. Tingkat pendidikan mereka umumnya rendah, dan sedikit yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam ilmu pertanian. Banyak dari mereka terlibat dalam sektor pertanian karena diturunkan secara turun-temurun dan didorong oleh pengalaman dan tuntunan dari orang tua mereka.

Kelompok tani menghadapi berbagai masalah, baik yang terkait langsung dengan produksi dan pemasaran hasil pertanian maupun aspek kehidupan sehari-hari mereka. Pertanian bukan hanya merupakan mata pencaharian, melainkan juga gaya hidup yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan tradisional. Semua aspek ini memegang peranan penting dalam keputusan dan tindakan para petani. Permasalahan yang umum dihadapi oleh petani melibatkan kegagalan panen dan harga jual hasil pertanian yang rendah menyebabkan kesulitan dalam memenuhi biaya produksi dan kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan kerugian.

Dengan adanya pemberdayaan Kelompok tani membantu dalam

¹ Agus Salim HR, Dkk, "Kinerja Kelompok Tani dalam Memberdayakan Masyarakat Di Masa Pandemic Covid 19", Makasar, Lpp Unismuh Makasar, 2021, Hlm 8

meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Mereka dapat menerapkan praktik-praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Dengan adanya kelompok tani, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, pelatihan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pertanian. Hal ini dapat membantu dalam pemberdayaan ekonomi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggal 15 Januari 2024 Desa Petaling Jaya memiliki beberapa kelompok tani hasil dari pemberdayaan yang ada di desa tersebut. Kelompok tani ini bergerak pada sektor pertanian cabai merah pemberdayaan yang dilakukan di desa petaling sendiri di mulai pada tahun 2017 pemberdayaan yang telah dilakukan seperti memberi bantuan alat-alat pertanian, pelatihan, sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pelatih penyuluhan lapangan (PPL) kepada kelompok tani. Berikut adalah data beberapa anggota kelompok tani di Desa Petaling Jaya

Tabel 1

Luas Lahan Kelompok Tani Desa Petaling Jaya

NO	NAMA KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN (Hektar)				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Kar Jaya	5,8	8,75	2,5	3	3
2	mber Rejeki	5,55	6	2	2	1,5
3	kmur Jaya	8,5	9,25	-	-	-

4	kar Tani	2,2	2,4	-	-	-
5	nggeng Jaya	3,8	3,8	-	-	-
6	mili Jaya	4,15	4,15	3	2	2

Sumber : *Data didapatkan dari Ketua Kelompok Tani*

Tabel 2

Hasil Produksi Kelompok Tani Desa Petaling Jaya

NO	NAMA KELOMPOK TANI	PRODUKSI (Kg)				
		TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mekar Jaya	68.500	83.000	25.000	24.000	30.000
2	Sumber Rejeki	77.850	58.000	12.000	15.000	10.000
3	Makmur Jaya	142.000	87.500	-	-	-
4	Mekar Tani	20.160	23.700	-	-	-
5	Langgeng Jaya	37.860	31.300	-	-	-
6	Famili Jaya	49.650	39.000	5.000	6,000	3.000

Sumber : *Data didapatkan dari Ketua Kelompok Tani*

Berdasarkan tabel data diatas dapat terlihat penurunan hasil produksi yang sangat signifikan terutama pada tahun 2021-2023. Bahkan terdapat beberapa kelompok tani yang sudah berhenti menanam cabai. Menurut ketua kelompok tani ada beberapa faktor yang menyebabkan petani cabai berhenti menanam cabai, faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman petani terhadap hama pada panen kedua cabai dan cara pengendalian hama yang efektif. Penyerangan hama pada tanaman kedua cabai ini mengakibatkan hasil produksi cabai menurun dan petani mengalami kerugian.

Kemudian dalam tabel diatas terlihat masih ada tiga kelompok tani yang masih aktif sampai sekarang diantaranya kelompok tani mekar jaya, sumber rejeki dan family jaya. Peneliti tertarik terhadap kelompok tani mekar jaya yang masih menghasilkan produksi cabai diatas 20.000 Kg setiap tahunnya dan menjadi kelompok tani dengan hasil produksi tertinggi setiap tahunnya terhitung mulai dari tahun 2021-2023. kelompok tani Mekar jaya di bentuk pada tahun 2017 dengan beranggotakan 10 orang.

Koptan mekar jaya merupakan sebuah kelompok tani yang bergerak pada sektor pertanian cabai. Awal mula pembentukan “Koptan Mekar Jaya” adalah gagasan dari salah satu masyarakat yang menginginkan pengembangan pertanian cabai namun terkendala dengan modal. Pemahaman tentang hama dan peralatan pertanian yang tidak lengkap. Dari kendala tersebut masyarakat membentuk kelompok tani. Dengan harapan adanya kelompok tani masyarakat dapat diberdayakan. Dengan adanya permasalahan tersebut sangat diperlukan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Untuk menambah relevansi data dalam penelitian ini, dilakukan pencarian literatur terdahulu yang dianggap relevan. Penelitian-penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari kesan kemiripan dengan penelitian saat ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, yang dilakukan oleh Kasming pada tahun 2019 dengan judul "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo", menunjukkan bahwa peran

pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di lokasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari segi regulasi pemerintah, di mana aturan dan mekanisme serta kebijakan pemerintah belum terlaksana dengan baik. Selain itu, dalam peran pemerintah sebagai dinamisor, seperti dalam kegiatan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan, belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun demikian, dalam peran sebagai fasilitator, yaitu dalam penyediaan bibit unggul, pupuk, dan peralatan produksi, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat petani dengan cukup baik².

Kedua, yang dilakukan oleh Mery Susanti pada tahun 2022 dengan judul "Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara", menunjukkan bahwa peran dinas pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di wilayah tersebut sudah berjalan, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Faktor-faktor kendala dalam upaya pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, termasuk anggaran yang terbatas dan kurangnya sarana serta prasarana. Saran dari penelitian ini meliputi pelaksanaan pelatihan teknis untuk petani dan petugas serta dukungan dana yang memadai dari pemerintah daerah³.

Ketiga, yang dilakukan oleh Ayu Astiara pada tahun 2023 dengan judul "Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pembinaan Kelompok Tani Padi Di Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe Provinsi

² Kasming, Skripsi "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo" Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019

³ Mery Susanti, Tesis "Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara", Medan, Universitas Medan Area, 2022.

Sulawesi Tenggara” dengan metode penelitian kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan pembinaan kelompok tani padi telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Dalam melaksanakan pembinaan kelompok tani padi Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disajikan, penelitian terdahulu memusatkan perhatian hanya pada peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang memusatkan perhatian pada peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam upaya pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya di Desa Petaling Jaya dan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi.

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan dalam latar belakang, muncul sejumlah permasalahan menarik yang menarik perhatian peneliti, terutama terkait peran Dinas Pertanian dalam memberdayakan kelompok tani. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil adalah "**Peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam.**"

⁴ Ayu astiara, skripsi “Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dalam Pembinaan Kelompok Tani Padi Di Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”, Sulawesi Tenggara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi dalam pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Petaling Jaya?
2. Efektivitas peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Petaling Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi dalam pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Petaling Jaya.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Petaling Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis manfaat penelitian ini untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan pemberdayaan Kelompok Tani terkhusus untuk yang mengkaji tentang peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura dalam pemberdayaan Kelompok Tani.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan pemangku kepentingan

terkait mengenai cara meningkatkan efektivitas pemberdayaan kelompok tani.

1.5 Landasan Teori

Teori dalam penelitian merujuk pada suatu kerangka konseptual atau seperangkat prinsip yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, atau memprediksi fenomena tertentu dalam suatu bidang ilmu. Teori biasanya didasarkan pada hasil observasi, eksperimen, dan analisis data yang ada. Dalam konteks penelitian, teori berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan hipotesis, merumuskan pertanyaan penelitian, serta memberikan panduan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Menurut Jonathan H. Turner mendefenisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”⁵

1.5.1. Teori Pemberdayaan

1.5.1.1. Pengertian Pemberdayaan

Dalam kondisi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan peningkatan kemampuan pribadi agar dapat mencapai kemandirian, salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau kemandirian kelompok yang kurang

⁵ Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), 49

berdaya dalam masyarakat, khususnya individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang diharapkan dari sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang memiliki kekuatan, memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti peningkatan kepercayaan diri, kemampuan menyuarakan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjadi mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai penanda keberhasilan dalam upaya pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan baik secara individual maupun dalam kelompok⁶.

1.5.1.2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk memungkinkan individu atau kelompok sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, menjadi lebih berdaya, kompetitif, dan mandiri. Dalam menjalankan proses pemberdayaan, terutama terhadap masyarakat, agen pemberdayaan harus mengikuti prinsip-prinsip yang mendasari pemberdayaan tersebut. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar

⁶ Edi Suharto., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Hlm. 59.

pemberdayaan dapat dilakukan dengan tepat. Berdasarkan esensi dan konsep pemberdayaan, beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁷

1. Pemberdayaa dilakukan secara demokratis, tanpa menggunakan unsur paksaan, dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang unik. Penggunaan metode yang memaksa harus dihindari karena tidak mencerminkan esensi dari pemberdayaan.
2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki oleh sasaran. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Proses pemberdayaan dimulai dengan membangkitkan kesadaran individu terhadap potensi dan kebutuhannya yang dapat diperkuat untuk mencapai kemandirian. Proses ini juga harus berfokus pada pengenalan kebutuhan dan potensi individu sasaran. Terutama dalam masyarakat pedesaan yang cenderung tertutup, aspek-aspek ini seringkali tidak terlihat. Oleh karena itu, agen pemberdayaan perlu melakukan identifikasi yang cermat dan akurat terhadap kebutuhan dan potensi individu sasaran. Dalam hal ini, agen pemberdayaan harus memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik potensi dan kebutuhan

⁷ Anwas, Oos M., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 70

individu sasaran.

3. Sasaran pemberdayaan merupakan subjek atau aktor utama dalam rangka kegiatan pemberdayaan. Karena itu, sasaran menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan, pendekatan, serta jenis kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan.
4. Pemberdayaan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, termasuk unsur pemerintah, tokoh masyarakat, guru, kader, ulama, pengusaha, relawan, dan warga lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai dengan peran, potensi, dan kapasitasnya masing-masing.

1.5.1.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan atau kapabilitas. Kekuatan ini mencakup berbagai aspek seperti fisik dan materi, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kecerdasan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan⁸. Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengembangkan kemandirian pada individu dan komunitas. Kemandirian tersebut mencakup kemampuan untuk berpikir secara mandiri, mengambil tindakan, dan mengontrol aktivitas yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat

⁸ Jamasi, Owin., Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: Belantika, 2004), Hlm. 115.

menggambarkan kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki.

1.5.2. Teori Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut siagian pemerintah memiliki peran penting dalam proses pembangunan nasional dan terdapat beberapa peran pemerintah yang menjadi tolak ukur yaitu:⁹

- a. Pemerintah selaku stabilitator, Bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai stabilisator untuk mencapai keseimbangan sosial yang berfokus pada stabilitas kondisi sosial dalam masyarakat.
- b. Peran pemerintah sebagai inovator, Sebagai penggerak inovasi, pemerintah berperan sebagai pelopor dalam menghasilkan ide-ide yang kreatif dan revolusioner dalam pembangunan. Inovasi baru yang diprakarsai oleh pemerintah, baik dalam metode maupun implementasinya, mengadopsi pola pikir dan sistem baru untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, hasil dari inovasi pemerintah mengarah pada situasi dan kondisi yang sesuai dengan sasaran, menjadikan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tetap efektif.
- c. Pemerintah sebagai modernisator, Dalam konteks ini, pemerintah

⁹ Siagian., Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

bertugas mengalihkan dan mendorong masyarakat agar mengadopsi pemikiran dan gaya hidup modern. Pengalaman sistem pemerintahan di berbagai negara menunjukkan bahwa jika pemerintah ingin menjadi agen modernisasi di masyarakat, proses modernisasi perlu terjadi terlebih dahulu dalam struktur birokrasi pemerintah sendiri.

- d. Pemerintah selaku pelopor, Ini berarti bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa, pemerintah harus memimpin dan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai pelopor utama, pemerintah harus mampu menjadi contoh yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat.
- e. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri, Ini artinya bahwa pemerintah diharapkan untuk berperan sebagai pelaksana yang efektif dalam berbagai kegiatan, meskipun diinginkan oleh masyarakat petani bahwa dengan kemajuan dan kemandirian masyarakat, peran langsung pemerintah dalam kelompok masyarakat tersebut akan berkurang.

Menurut Labolo ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu ¹⁰:

- 1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan Fungsi primer atau fungsi pelayanan adalah peran pemerintah dalam memberikan layanan publik yang tidak dapat disembunyikan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, serta layanan kepada masyarakat dan administrasi birokrasi.

¹⁰ Labolo, Muhadam., Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Pemerintah berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat dan tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Di sisi lain, dalam fungsi pemberdayaan, terdapat tiga peran utama pemerintah yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah, dalam perannya sebagai regulator, bertugas sebagai pembimbing dan pengatur bagi masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan. Ini dilakukan melalui penyusunan dan penegakan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengembangan dan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan pedoman dasar yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai panduan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai pengembangan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat dalam hal aturan dan mekanisme.

Peran regulator yang kemudian dikembangkan berfokus pada aspek aturan atau mekanisme. Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu menciptakan aturan atau mekanisme sebagai panduan yang ditetapkan untuk mengatur aktivitas setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kebijakan atau aturan lain yang sesuai.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta menjaga dan merangsang dinamika pembangunan di daerah setempat. Pemerintah bertugas memberikan panduan dan arahan yang efektif dan menyeluruh kepada masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial. Karena kebutuhan masyarakat yang besar akan peran pemerintah, bimbingan, arahan, dan masukan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga dinamika pembangunan di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu atau penyuluh yang bertugas memberikan arahan, bimbingan, dan pelatihan kepada masyarakat.

Untuk mendalami konsep dinamisator lebih lanjut, hal ini dijabarkan ke dalam beberapa aspek, yaitu (1) sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan, dan (4) kunjungan lapangan. Sosialisasi merujuk pada proses penanaman atau transfer nilai-nilai, aturan, dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Pendampingan, dalam konteks ini, mengacu pada kegiatan yang melibatkan ahli dalam pemberdayaan kelompok tani untuk berkomunikasi, memberikan arahan, dan memberikan motivasi kepada masyarakat. Pelatihan

adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat. Kunjungan lapangan adalah kegiatan terjadwal yang direncanakan untuk mengamati dan memahami situasi dan kondisi langsung di lokasi tertentu.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator mencakup menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pelaksanaan pembangunan, menghubungkan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, serta mengoptimalkan aktivitas pembangunan di daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan dapat menjadi agen yang memfasilitasi dan menyediakan sarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memastikan kondisi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan infrastruktur pembangunan, baik untuk pengelolaan sumber daya alam maupun untuk kepentingan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang diberdayakan.

Sebagai fasilitator, dalam lingkup tanggung jawabnya, juga memiliki kewajiban dan wewenang untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendukung kelancaran kegiatan. Dengan menyediakan bibit unggul, pupuk, dan peralatan produksi lainnya, diharapkan dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat agar

memanfaatkannya, sehingga peran fasilitator dalam kegiatan tersebut dapat dijalankan secara lebih efektif.

1.5.3. Teori Efektivitas Organisasi

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "effective," yang merujuk pada keberhasilan atau pencapaian yang baik. Dalam kamus ilmiah yang umum digunakan, efektivitas didefinisikan sebagai akurasi penggunaan, hasil yang diperoleh, atau dukungan terhadap tujuan. Efektivitas dianggap sebagai elemen kunci untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu hal dikatakan efektif ketika berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya¹¹.

Evaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep efektivitas, yang merupakan faktor penentu apakah perlu dilakukan perubahan signifikan terhadap struktur dan manajemen organisasi. Efektivitas dalam konteks ini mencakup pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya secara efisien, yang dilihat dari aspek input, proses, dan output. Sumber daya yang dimaksud mencakup personil, fasilitas, metode, dan model yang digunakan. Keefisienan suatu kegiatan terjadi ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur, sementara keefektifan tercapai ketika kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan dengan benar, tetapi juga

¹¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), Hlm. 3.

memberikan hasil yang bermanfaat.

Menurut Ducan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Efektivitas organisasi yaitu ¹²:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses, yang mencakup faktor-faktor seperti kurun waktu pencapaian yang ditentukan, sasaran yang bersifat konkret, dan dasar hukum.

b. Integrasi

Integrasi diukur berdasarkan kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Faktor-faktor yang terlibat meliputi prosedur dan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi dinilai dari kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi mencakup kemampuan untuk dinamis mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasional ketika lingkungan mengalami perubahan. Faktor-faktor yang terlibat dalam adaptasi meliputi peningkatan kemampuan, serta sarana dan prasarana.

¹² Steers, Richard M. "Organization Effectiveness, A Behavioral View, Good Year Publishing Company". Terjemahan oleh Magdalena Jamin, Jakarta Erlangga. 2003.

Dengan demikian, Duncan mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui evaluasi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dengan masing-masing faktor memiliki peran penting dalam menilai kinerja organisasi secara holistik.

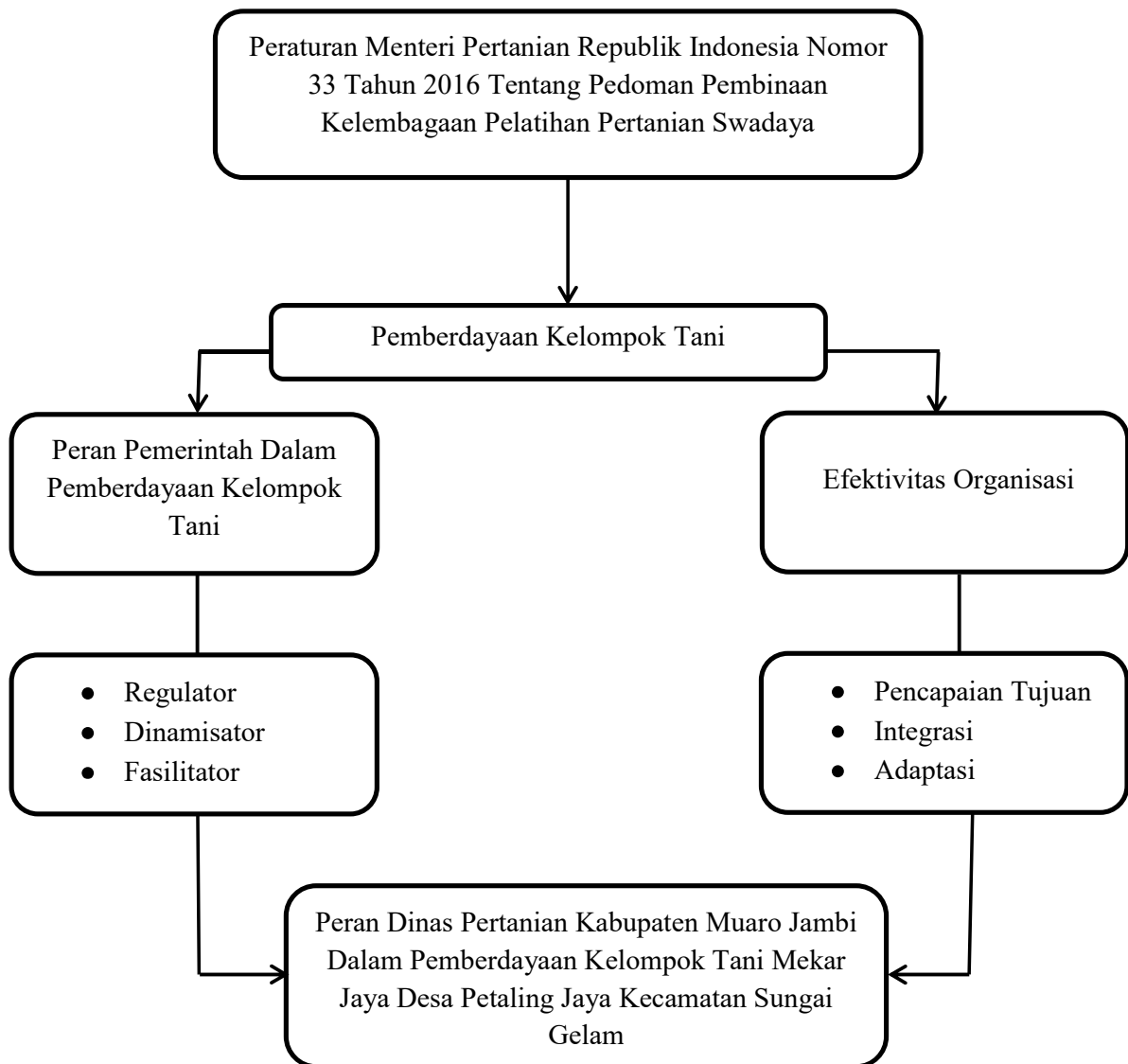
1.6 Kerangka Berfikir

Dalam Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, 22 pada bagian Bab III yang mengulas tentang pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, dinyatakan bahwa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, pemerintah perlu mengimplementasikan dan melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan.

Peran pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani dapat dilihat melalui tiga aspek. Pertama, sebagai regulator yang meliputi pengaturan dan prosedur terkait pemberdayaan dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Kedua, pemerintah bertindak sebagai dinamisor dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan kunjungan lapangan. Ketiga, pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan bibit unggul, pupuk, pestisida, herbisida, dan peralatan pertanian.

Untuk menilai efektivitas program yang dilaksanakan, dapat digunakan beberapa indikator. Pertama, pencapaian tujuan dapat diukur melalui faktor-faktor seperti waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan,

sasaran yang spesifik, dan landasan hukum yang ada. Kedua, integrasi dapat dilihat dari keberhasilan dalam menyosialisasikan program dan prosedur yang dilaksanakan. Ketiga, adaptasi melibatkan peningkatan kemampuan serta ketersediaan sarana dan prasarana, yang berarti program tersebut dapat meningkatkan atau memperluas kapabilitas yang ada.



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap mampu memberikan perspektif yang akurat dan mendalam.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian kepada Kelompok Tani Mekar Jaya.

1.7.3 Fokus Penelitian

Definisi dari fokus penelitian adalah lingkup tunggal atau beberapa aspek yang terkait dalam konteks situasi sosial. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menentukan fokus penelitian berdasarkan temuan nilai yang diidentifikasi, sekaligus mempertimbangkan masalah-masalah yang terkait dengan teori dan informan. Oleh karena itu, hal yang menjadi pusat perhatian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹³

1. Peran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani, peran sebagai pelaksana kebijakan,

¹³ Muhammad Iswahyudi Subhan Dkk, "Buku Ajar Metodologi Penelitian" (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hlm 22.

dinamisor dan fasilitator.

2. Efektifitas pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang di lakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi.
3. Kesejahteraan masyarakat terutama yang tergabung dalam anggota kelompok tani.

1.7.4 Teknik Penentu Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data¹⁴. Informan ini akan menjalani proses wawancara guna memperoleh tanggapan yang terkait dengan keterlibatan Dinas Pertanian dalam usaha pemberdayaan kelompok tani yang menjadi fokus studi, yaitu Kelompok Tani Mekar Jaya di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 3
Tabel Informan

NO	Informan	Fungsi
	kepala Dinas Tanaman	Alasan untuk mendapatkan informasi

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, alfabeta,2023) hlm. 95-96.

	Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi	penting mengenai fungsinya melibatkan koordinasi, pengawasan dan implementasi kebijakan pertanian untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani.
	Penyuluh pertanian lapangan Desa Petaling Jaya	Memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan kelompok tani. Mereka dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan, kebutuhan, dan dampak program pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas pertanian.
	Kepala Desa Petaling Jaya	kepala desa dapat menjadi informan dalam penelitian tersebut karena memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi pertanian di desa, keterlibatan dinas pertanian, serta peran kelompok tani dalam pembangunan pertanian lokal. Keberadaannya dapat memberikan wawasan yang berharga untuk menggambarkan dinamika pemberdayaan kelompok tani dan efektivitas peran dinas pertanian dalam mendukungnya.
	Ketua Kelompok Tani	mereka memiliki pengalaman langsung

		dalam berinteraksi dengan dinas pertanian dan memahami secara mendalam tantangan serta kebutuhan kelompok tani. Dengan demikian, kontribusi mereka dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengidentifikasi efektivitas peran dinas pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani.
	Anggota Kelompok Tani	karena anggota memiliki pengalaman langsung mereka dapat memberikan wawasan tentang interaksi, dukungan, dan dampak kebijakan pertanian. Informasi dari para anggota kelompok tani dapat membantu memahami efektivitas program pemberdayaan dan menyediakan perspektif langsung dari pelaku utama dalam konteks pertanian.

Sumber : di olah oleh penulis tahun 2024

1.7.5 Sumber Data

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument

kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal atau kata-kata, baik melalui ucapan lisan, gerakan tubuh, atau perilaku yang ditunjukkan oleh informan terkait variabel yang sedang diteliti. Peneliti memperoleh data primer secara langsung melalui interaksi dengan sumber informasi, seperti wawancara dengan pihak informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti, melainkan melalui sumber-sumber seperti buku referensi, jurnal penelitian, dan internet¹⁵.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Secara prinsip, untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, diperlukan data yang kuat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,¹⁶ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

¹⁵ Jose Beno, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur),"Jurnal Saintek Maritim 2, no. 22 Maret 2022: Hlm 120.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2012

Melalui teknik observasi, peneliti mampu secara langsung mengamati lokasi yang menjadi fokus penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk secara visual menilai serta membuat kesimpulan terkait peran Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi dalam memberdayakan Kelompok Tani Mekar Jaya di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan untuk memperkuat kesimpulan yang berasal dari hasil observasi. Ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung secara lisan antara peneliti dan informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan materi elektronik seperti foto-foto atau rekaman tempat penyimpanan arsip. Pentingnya dokumentasi terletak pada kontribusinya untuk mendukung validitas hasil penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Meles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : Data reduksi, penyajian

data dan penarikan kesimpulan¹⁷.

a. Reduksi data

Peneliti pemula dapat melakukan proses reduksi data secara mandiri dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, mereka dapat mengadakan diskusi dengan teman atau pihak yang dianggap berpengalaman. Melalui diskusi tersebut, diharapkan pengetahuan peneliti akan berkembang, dan hasil reduksi data yang diperoleh akan lebih signifikan dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

b. Penyajian data

Pengurangan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan melalui proses pemilihan, penekanan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi terhadap informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Hal ini mencakup pembuatan rangkuman, pemilihan elemen-elemen kunci, fokus pada aspek-aspek yang signifikan, serta penghapusan yang tidak relevan dengan langkah-langkah berikut: 1. seleksi data, 2. pembentukan kategori data, dan 3. pengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai.

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, terjadi penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang diberikan bersifat sementara dan

¹⁷ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2016

bisa berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya. Proses pengumpulan bukti-bukti tersebut dikenal sebagai verifikasi data.

1.7.8 Keabsahan Data

Validitas data menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat data memiliki peran krusial sebagai elemen yang digunakan untuk analisis data. Selanjutnya, data tersebut akan menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan, sehingga penting bahwa data yang diperoleh memenuhi kriteria keabsahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dalam memastikan keabsahan data dalam konteks penelitian kualitatif. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai keabsahan data adalah triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi diartikan sebagai proses pengujian keabsahan data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, menggunakan metode yang berbeda, dan dilakukan pada waktu yang berbeda berikut uraiannya¹⁸:

- a. Triangulasi sumber Sebagai peneliti, penting untuk mencari lebih dari satu sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap data atau informasi.

¹⁸ Muftahatus sa'adah dkk, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," Jurnal Tadris Matematika 1, No. 2 (December 24, 2022): Hlm 56.

b. Triangulasi metode/teknik

Menerapkan beragam metode untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan. Jika pada awalnya peneliti memilih wawancara sebagai metode, kemudian menggabungkannya dengan pengamatan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dari sumber yang sama.

c. Triangulasi waktu

Penerapan triangulasi waktu seringkali memengaruhi kepercayaan data. Data yang diperoleh dari teknik wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan informasi yang valid cenderung lebih dapat dipercaya. Melakukan wawancara, atau observasi juga mempengaruhi kredibilitas data.